

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Kabupaten Bandung Tahun 2001-2014, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

2.1.1 Pengertian Industri

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. (www.Organisasi.OrgIndustri)

Menurut (Kartasapoetra, 2000). Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya. Dalam pengertian lain industri adalah suatu aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan tujuan untuk dijual.

Menurut (Hasibuan, 2000) pengertian industri sangat luas, dapat dalam lingkup makro maupun mikro. Secara Mikro Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat yang saling mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni cenderung bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu secara mikro sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang sedangkan secara makro.

Pembangunan ekonomi disuatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut. Dimana dimulai dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri (Budiyanto, 2009). Menurut istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umumnya disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), produksi dan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.1 Pengertian Industri Manufaktur

Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri yang dimengerti orang pada umumnya. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya berarti perusahaan yang menjalankan operasi

dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Kegiatan seperti itu antara lain ialah pabrik tekstil, pabrik perakitan atau pembuat mobil dan pabrik pembuat makanan ringan. Dalam teori ekonomi istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Sebagai contoh, jika dikatakan industri mobil maka yang dimaksudkan adalah berbagai perusahaan mobil yang ada dalam pasar yang sedang dianalisis. Sedangkan kalau dikatakan industri beras maka yang dimaksudkan adalah seluruh produsen beras yang ada dalam pasar (Sadono Sukirno, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1984, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi nilai penggunaannya termasuk rekayasa industri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984, dinyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2009), industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini

adalah kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling). BPS membagi industri menjadi tiga kelompok yaitu industri primer, industrisekunder dan industri tersier. Industri primer bertumpu pada pengolahan sumber-sumber yang berasal dari alam seperti pertanian, kehutanan dan pertambangan. Industri sekunder mengacu pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut produk-produk primer. Industri tersier yaitu suatu industri yang memberikan pelayanan jasa kepada industri primer maupun industri sekunder.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Industri Manufaktur

A. Jenis industri berdasarkan Klasifikasi atau berdasarkan SK menteri Perindustrian No.19/M/I/1986

Berdasarkan Internasional Standart of Industrial Clasification (ISIC), berdasarkan pendekatan kelompok komoditas industry pengolahan terbagi atas beberapa kelompok komoditas, yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Kelompok Komoditas Industri Manufaktur

Kode	Kelompok Industri
31	Industri makanan, minuman, tembakau
32	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit
33	Industri kayu, dan barang-barang dari kayu termasuk perabotan rumah tangga
34	Industri kertas dan barang-barang dari kertas, penerbitan dan percetakan
35	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik
36	Industri galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara
37	Industri logam dasar
38	Industri barang dari logam, mesin dan peralatan
39	Industri pengolahan lainnya

Sumber: Kementrian Perindustrian dan Perdagangan

2.1.2 Teori Industrialisasi

Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya merupakan suatu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dua pengertian sekaligus. Pertama yaitu tingkat hidup yang lebih maju. Kedua, menjadikan taraf hidup yang lebih berkualitas, atau dengan kata lain pembangunan industri itu sendiri merupakan kegiatan mandiri yang hanya sekedar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik belaka (Arsyad, 2010:442).

Keberhasilan sebuah proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia yang relevan dan kemampuan “proses” tersebut dalam memanfaatkan secara optimal setiap sumber daya alam dan sumber daya lain yang tersedia. Hal ini berarti pula bahwa industrialisasi merupakan sebuah upaya guna meningkatkan produktivitas tenaga manusia dengan disertai upaya untuk memperluas ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian proses industrialisasi dapat diupayakan dengan dua jalan sekaligus yaitu. Secara Vertikal: yang diindikasikan oleh semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi. Secara Horizontal: yang diindikasikan dengan semakin luasnya lapangan kerja yang produktif yang tersedia bagi penduduk. (Arsyad, 2010:442).

Disisi lain sektor industri mempunyai peranan salah satunya sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang membawa perekonomian menuju kemakmuran. Sektor industri dijadikan leading sktor sebab hal tersebut mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sektor pertanian dan jasa. Kelebihannya antara lain, produksinya mempunyai dasar nilai tukar (*tern of trade*) yang tinggi, nilai tambah

besar, bagi pengusaha keuntungan yang besar, dan proses produksinya lebih dikendalikan oleh manusia (Arsyad, 2010:442).

2.1.2.1 Klasifikasi Industri

A. Jenis Industri berdasarkan pengelompokan Tenaga Kerja

Menurut (Arsyad, 2010:454) pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu:

1. Industri Besar : industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
2. Industri Menengah : industri yang menggunakan tenaga kerja antara 20-99 orang.
3. Industri Kecil : industri yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 orang.
4. Industri Mikro / Rumah Tangga : industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

B. Jenis Industri berdasarkan besar kecilnya modal

1. Industri padat modal (*Capital Intensive*), adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
2. Industri padat karya (*Labor Intensive*) industri yang lebih dititikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerjadalam pembangunan dan pengoperasiannya. (Perpustakaan Online Indonesia).

C. Jenis industri berdasarkan pemilihan lokasi

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industry*), industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong dimana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor (*man power oriented industry*), industri yang berada pada lokasi dipusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi untuk menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented Industry*), industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

D. Jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan

1. Industri Primer, yaitu industri yang mana barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu.
2. Industri Sekunder, yaitu industri yang bahan mentahnya diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.
3. Industri Tersier, yaitu industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan.

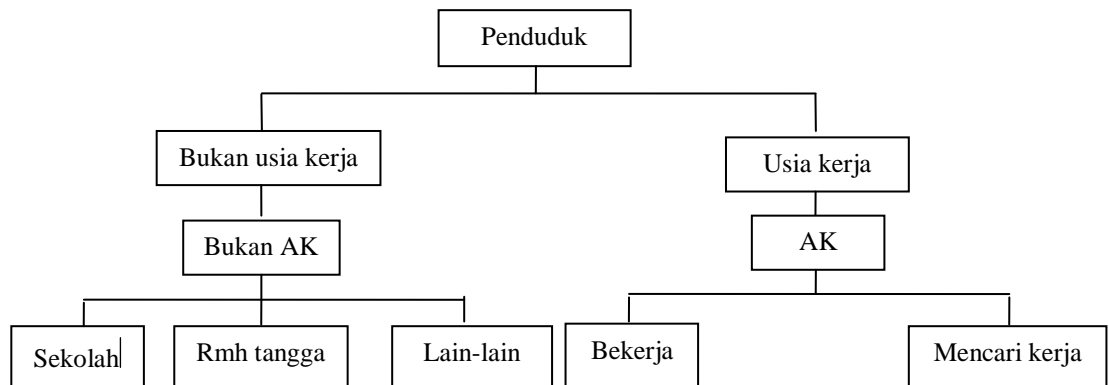
2.1.3 Tenaga Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda. Usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah di anggap mampu melaksanakan pekerjaan, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tanggam dan kelompok lainnya seperti pensiunan. (Disnaker, 2008).

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan agkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut di harapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnyaakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataanya jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberilan dampak positif terhadap kesejahteraan. (Disnaker, 2008).

Bagan gambaran ketenagakerjaan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar

Gambar 2.1
Gambaran Ketenagakerjaan

Dari bagan diatas terlihat bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang termasuk kedalam usia kerja. Usia kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 15-64 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk diluar usia kerja, yaitu dibawah usia kerja dan diatas usia kerja, penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dan yang sudah pensiun atau usia lanjut. Bagian lain penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. yang termasuk didalamnya adalah para remaja yang sudah termasuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belum mencari pekerjaan karena masih sekolah, ibu rumah tangga pun termasuk kelompok bukan angkatan kerja. (BPS Provinsi Jawa Barat).

Penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dikelompokkan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga

kerja (*Man Power*) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentunya akan membawa pengaruh yang tidak baik untuk perekonomian, yakni penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja atau kesempatan kerja tidak mampu menampung seluruh tenaga kerja maka yang akan terjadi ialah akan membuat semakin banyak pengangguran. Dalam penciptaan lapangan kerja tentunya merupakan salah satu masalah di tanah air. Misalnya bukan hanya bagaimana menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan juga kualitas tenaga kerja. (BPS Provinsi Jawa Barat).

Menurut (Simanjuntak, 1985), tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Istilah tenaga kerja selalu dikaitkan dengan jumlah para pekerja sebenarnya atau potensial yang tercakup dalam suatu penduduk. Tenaga kerja biasanya diukur menurut unit orang yang terdapat di dalamnya, dan bukan dari segi unit pekerjaan. Karena kegiatan pekerjaan senantiasa mengalami perubahan yang kontinu, semua kegiatan tersebut harus dihitung pada suatu saat tertentu, dan sedapat mungkin menurut jangka waktu yang sama atau yang singkat (Jumriadi, 2010:10).

Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja (*man power*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. (Disnaker Kabupaten Bandung). Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha (BPS, 2007).

(Sudarsono ,2007), menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan

oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.

Penyerapan tenaga kerja juga dapat diartikan secara luas yakni menyerap tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan (Mulyadi, 2008). Jadi, berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Bandung.

2.1.4 Investasi

2.1.4.1 Pengertian Investasi

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan

memproleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Menurut (Sukirno, 2002), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Tidak jauh berbeda dari pendapat yang dikemukakan oleh (Mankiw, 2003), investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan di masa depan. Para ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dan juga semakin kecil (Nopirin, 2000).

Teori neoklasik tentang investasi menyebutkan bahwa investasi merupakan akumulasi modal optimal. Menurut teori ini, stok modal yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa modal relatif terhadap harga output. Jadi, menurut teori ini, perubahan di dalam output akan mempengaruhi baik stok modal maupun investasi yang diinginkan (Nanga, 2005).

Teori neoklasik didasarkan pada pemikiran-pemikiran ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-perusahaan. Untuk memaksimalkan keuntungannya, setiap perusahaan akan menggunakan suatu faktor produksi hingga pada suatu tingkat di mana nilai produksinya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Bila diaplikasikan pada tenaga kerja berarti nilai produksi marginal seorang tenaga kerja dinamakan hasil penjualan produksi tenaga kerja atau (*marginal revenue product of labour*) adalah sama dengan upah tenaga kerja tersebut. Bila diaplikasikan pada modal, keadaan yang akan memaksimalkan keuntungan modal adalah sama dengan biaya untuk memperoleh satu unit tambahan modal (Sukirno, 2006).

Menurut (Keynes dikutip dari Darling, 2008:18), tingkat bunga bukanlah satu-satunya yang menyebabkan naik turunnya investasi melainkan juga adanya kemungkinan keuntungan yang diharapkan dari sejumlah investasi yang disebut Keynes sebagai *marginal efficiency of capital* (MEC). Yang dimaksud dengan harapan keuntungan adalah besarnya persentase kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Maka secara rasional keputusan pengusaha untuk melakukan investasi kemungkinan terjadi antara lain jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar daripada tingkat bunga, maka investasi dilakukan. Dengan demikian investasi akan naik atau menjadi besar. Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih kecil daripada tingkat bunga maka investasi tidak dilakukan. Ini menyebabkan investasi akan turun atau semakin rendah. Jika keuntungan yang

diharapkan (MEC) sama dengan tingkat bunga maka, bila perusahaan berorientasi sosial maka investasi akan dilakukan, sedangkan bila perusahaan berorientasi profit, maka investasi tidak akan dilakukan. Investasi dapat berupa penanaman modal, baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

2.1.4.2 Investasi (PMA)

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967, PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status, yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman. PMA bisa secara penguasaan penuh atas bidang usaha yang bersangkutan (100% asing) ataupun kerjasama atau patungan dengan modal Indonesia. Kerjasama dengan modal Indonesia tersebut dapat terdiri dari: hanya dengan pemerintah (misalnya pertambangan) atau pemerintah maupun swasta nasional. Jangka waktu PMA di Indonesia tidak boleh melebihi 30 tahun dan bidang usaha yang terbuka atau tertutup bagi PMA adalah pelabuhan, listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, mass media, dan bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan industri militer. Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi,

yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.

Investasi langsung yang dikenal dengan PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Dibanding dengan investasi portofolio, PMA lebih banyak mempunyai kelebihan. Selain sifatnya yang permanen atau jangka panjang, PMA memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Argumen yang mendukung PMA sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. PMA merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi negara penerimanya. Semua ini merupakan faktor-faktor kunci yang dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan. (Todaro, 2000).

2.1.4.3 Investasi (PMDN)

Investasi dalam negeri biasa dikenal dengan istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Keberadaan

penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 tahun 1970. Menurut ketentuan penanaman modal tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah menggunakan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan/disisihkan guna menjalankan usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya (Harjono, 2007:178).

Menurut (Wiranata, 2004:18) dasar pertimbangan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 1970 tentang PMDN adalah sebagai berikut:

1. Modal merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan kemampuan dan kesanggupan bangsa Indonesia itu sendiri.
2. Perlunya dilakukan pemupukan modal dan pemanfaatan modal dalam negeri dan membuka kesempatan bagi pengusaha swasta seluas-luasnya.
3. Perlunya memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki pihak asing dan menetapkan batas waktu usaha bagi perusahaan asing di Indonesia yang menggunakan modal dalam negeri.

Pengembangan investasi-investasi daerah dalam memacu pertumbuhan PMDN, sangat penting untuk di tingkatkan. Sebab PMDN merupakan bentuk arus modal yang berasal dari dalam negeri sehingga dengan meningkatnya PMDN di

harapkan investor-investor dalam negeri dapat bersaing dengan investor asing dalam kontribusinya meningkatkan perekonomian. (Wiranata, 2004).

Pengertian PMDN menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1968 adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara, swasta nasional maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan dan disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1967, tentang PMA. Menurut undang-undang ini, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan asing, di mana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing di mana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh negara atau swasta nasional. Pada prinsipnya semua bidang usaha terbuka untuk swasta atau PMDN kecuali bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan strategis.

Jenis-Jenis Investasi Menurut (Rosyidi, 2000:169) jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok (bertujuan agar tidak terjadi jenis investasi yang masuk dalam dua pengelompokan), antara lain:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional: a. *Autonomos Investment* (Investasi Otonom), merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional.

Induced investment (Investasi terimbas) adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

2. Berdasarkan Subjeknya: a. *Public Investment* (Investasi Pemerintah), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. b. *Private Investment* (Investasi Swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
3. Berdasarkan Alasannya: a. *Domestic Investment* (Investasi Dalam Negeri), merupakan penanaman modal didalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri. b. *Foreign Investment* (Investasi Asing), yaitu penanaman modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumberdaya yang masih belum dimanfaatkan.
4. Berdasarkan unsur pembentukannya: a. *Gross Investment* (Investasi Bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu. b. *Net Investment* (Investasi Neto), merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (*Depreciation*) atau disebut Investasi Bersih.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Menurut ahli-ahli ekonomi dalam (Sukirno, 2001:149) ada lima faktor yang menentukan investasi antara lain:

1. Ramalan Mengenai Kedaan Dimasa Yang Akan Datang.
2. Tingkat Bunga. Dalam keadaan dimana pendapatan yang akan diperolehnya dari membungakan tabungannya adalah lebih besar daripada keuntungan yang akan diperolehnya maka besar kemungkinan pengusaha tersebut akan membungakan uangnya dan membatalkannya.
3. Keuntungan yang Dicapai Perusahaan. Apabila perusahaan-perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan tabungan yang dicapai dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, mereka tidak perlu membayar bunga keatasnya. Ini akan menurunkan biaya investasi yang dilakukan dengan memperbesar keuntungan menimbulkan suatu pengaruh lain keatas investasi.

2.1.4.4 Peranan Investasi

Motif utama suatu negara mengundang investasi adalah untuk menggali potensi kekayaan alam dan sumberdaya lainnya dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi. Kenyataan ini disebabkan investasi, baik asing maupun domestik akan meningkatkan pertumbuhan teknologi, alih kepemilikan, perluasan kesempatan kerja yang disertai dengan peningkatan keahlian dan keterampilan. Namun, dalam proses tersebut harus dihindari dominasi perekonomian nasional oleh modal asing (Wiranata, 2004:12).

2.1.4.5 Tujuan Penyelenggara Investasi

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Wiranata, 2004) berpendapat bahwa investasi dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua Negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno, 2006), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi

yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. (Sukirno, 2006).

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah kemampuannya sebagai akibat perkembangan pendidikan dan pengalaman kerja serta pendidikan keterampilan mereka juga berkembang. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja memiliki peranan yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai sumber daya pembangun, tenaga kerja diposisikan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Dengan demikian naik turunnya produktivitas ditentukan oleh kinerja tenaga kerja. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Nopirin, 2000), bahwa jumlah serta proporsi faktor produksi (modal dan tenaga kerja) yang dimiliki suatu negara menentukan kapasitas produksi negara tersebut, yang tercermin pada kurva kemungkinan produksi. Demikian juga menurut (Todaro, 2000), bahwa jumlah

tenaga kerja yang besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Menurut (Todaro dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku

di tahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral atau lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. (Sukirno, 2006).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga konstan menurut BPS adalah jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. PDRB atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. (BPS, 2010).

Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai

oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. (Sukirno,2006).

2.1.5.1 Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2013).

Produk domestik daerah merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah domestik, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari penduduk daerah tersebut ataupun tidak. Penghitungan produk domestik lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disebut domestik karena Pengaruh Inflasi, PDRB dan menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB

atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, serta sebagai dasar berbagai analisa perekonomian. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sistem spasial suatu bangsa atau negara. Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukuran pertumbuhan ekonomi antara lain (1) PDRB, (2) pendapatan perkapita 3) jumlah penduduk, dan 4) lapangan kerja. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam kemakmuran suatu wilayah, disini pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan suatu keluaran wilayah, peningkatan ini meliputi baik kapasitas produksi ataupun volume riil produksi (Adisasmita, 2005).

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai peningkatan dalam sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diperoleh disuatu wilayah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagangan yaitu dapat diperolehnya komoditas sebagai suplai hasil akhir yang yang meningkat melalui pertukaran antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi disuatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Menurut Rahardjo (Adisasmita, 2005) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan

ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bias didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau *produc domestic regional bruto* (PDRB).

Menurut (BPS, 2009) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

Perhitungan PDRB merupakan bentuk perhitungan yang memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai produk barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu wilayah regional dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain. Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi. Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added) masing-masing sektor.

$$Y = (PXQ)1 + (PXQ)2 + \dots + (PXQ)n$$

Ket:

Y = Pendapatan Nasional

P = harga

Q = kuantitas

2. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi aktif dalam proses produksi di suatu wilayah regional dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa factor produksi yang

dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).

$$Y = R + W + I + P$$

Ket :

Y = pendapatan nasional

R = rent = sewa

W = wage = upah/gaji

I = interest = bunga modal

P = profit = laba

3. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan perubahan dari pengeluaran yang dilakukan untuk dikonsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik regional bruto, perubahan stok dan ekspor netto di dalam suatu wilayah

regional dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

1) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods).

2) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)

Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (government expenditure). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

3) Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Yang termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.

4) Ekspor Neto (Net Export)

Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor netto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar

daipada impor. Perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain (dunia).

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Ket :

Y = Pendapatan Nasional

C = konsumsi masyarakat

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

X = ekspor

M = impor

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah / provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDRB dan bukan indikator lainnya seperti misalnya, pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Alasan-alasan tersebut adalah :

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi dalam perekonomian dalam suatu daerah / provinsi. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*), artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran menghitung PDRB,

memungkinkan kita membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya.

3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah suatu provinsi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi domestik.

A. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Beberapa metode yang digunakan untuk menghitung PDRB suatu wilayah, antara lain Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Metode yang digunakan secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. PDRB Atas Harga Berlaku

Perhitungan PDRB atas harga berlaku ini dapat dilakukan dengan dua metode yaitu :

a. Metode Langsung

Pada perhitungan metode langsung ini dilakukan dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama.

b. Metode Tidak Langsung

Dengan metode ini nilai tambah dari suatu wilayah antar wilayah diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi

nasional atau regional provinsi kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional kabupaten / kota menggunakan indikator yang mempunyai pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut.

2. PDRB Atas Harga Konstan

Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung Nilai Tambah Bruto (NTB) atas harga konstan yaitu;

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antar masing-masing tahun dengan tahun dasar 1993. Hasilnya merupakan output dan biaya antara atas harga konstan 1993. Selanjutnya NTB atas harga konstan diperoleh dari selisih output dan biaya antara dalam praktek. Sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut.

b. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun dasar konstan 1993 diperoleh dengan cara menjadikan nilai tambah pada tahun dasar 1993 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolasi dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari

berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung.

c. Deflasi

Nilai tambah atas harga konstan 2000 diperoleh dengan caramembagi nilai tambah atas harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflasi biasanya merupakan Indeks Harga Konstan (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan sebagainya. Indeks harga diatas dapat pula dipakai sebagai inflator dalam keadaan dimana nilai tambah atas harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai atas harga konstan dengan indeks harga tersebut.

d. Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga digunakan sebagai deflator untuk menghitung perhitungan output atas harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara indeks harga dari komponen input terbesar.

2.1.6 Inflasi

2.1.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono Sukirno, 2001:15). Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu, semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. (Sadono Sukirno, 2001).

Inflasi merupakan kecendrungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya. Inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitas inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga

dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (*hyper inflation*) maka perusahaan akan mengurangi jumlah output akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah. (Nanga, 2005:248).

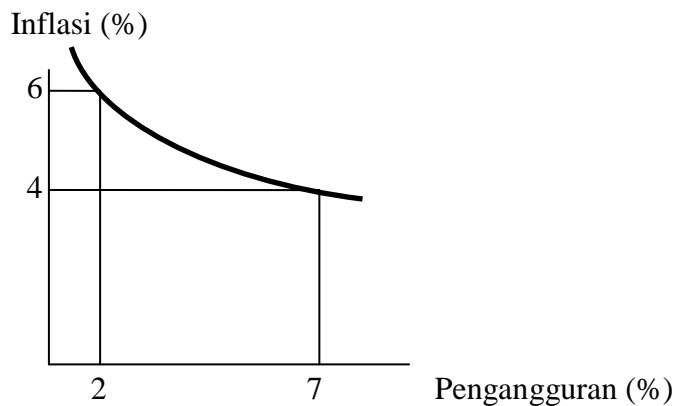
Studi tentang hubungan inflasi dengan pengangguran menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda. A.W. Phillip (1958) yang pertama kali melakukan studi ini berpandangan adanya trade off antara inflasi dengan pengangguran, pandangan ini dikenal dengan Phillip's Curve jangka pendek. Edmund Phelps dan Milton Friedman berpandangan bahwa terdapat perbedaan antara kurva Phillips jangka panjang dan jangka pendek. Menurut mereka, pendekatan terkini akan miringnya kurva Phillip hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, terdapat tingkat pengangguran minimum yang konsisten terhadap inflasi yang stabil atau disebut Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU).

Menurut Dernburg dan Karyaman Muchtar (1994 : 330), jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah. Hubungan antara tingkat

inflasi dengan pengangguran digambarkan oleh kurva Phillips. Adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran naik atau hubungan searah (tidak ada trade off) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva Philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah.

Penelitian lainnya yang terdapat kesamaan serta mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2007) yang berjudul “Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007”. Dalam penelitian beliau, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 1980 sampai 2007. Adapun hubungan positif maupun negatif inflasi terhadap tingkat pengangguran yang terjadi. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga atau pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Kurniawan (2013).

Teori yang signifikan dalam menjelaskan sebab akibat inflasi adalah Kurva Phillips, seperti pada gambar di bawah ini:



Sumber: Salvatore 2007

Gambar 2.2
Kurva Phillips

Kurva Philips di atas menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang atau bisa dilihat pula dengan tingkat inflasi yang stabil akan menurunkan tingkat suku bunga yang secara langsung kemudian akan memicu banyaknya permintaan atas kredit usaha dan akan banyak industri atau sektor usaha yang bermunculan, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat seiring kesempatan kerja yang tinggi. Kurniawan (2013).

2.1.7 Penyerapan Tenaga Kerja

2.1.7.1 Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional (Payaman Simanjuntak, 1985).

Pada negara yang sedang berkembang umumnya masalah pengangguran merupakan problema yang sulit dipecahkan hingga kini. Karena masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi yang maksimal. Seperti halnya dinegara Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai jalan keluar untuk dapat mengatasi pengangguran secara lambat laun baik diperkotaan dan dipedesaan. Proses dari usaha-usaha kesempatan kerja yang merupakan topik dalam penelitian ini dapat diwujudkan apabila pembinaan dan pembangunan industri-industri kecil, sedang dan besar dapat berjalan semestinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong perekonomian rakyat. Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam

makanya menghimpun orang atau tenaga kerja disuatu lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan usaha itu sendiri. Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Seetiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya dalam pendapatan nasional (Payman Simanjuntak, 2001). Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam hal penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di Kabupaten Bandung di Industri Manufaktur.

Adapun pendapat lain yaitu menurut (Todaro, 2003), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan.

Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian tentang penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di kabupaten bandung, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil yang dilakukan. Ringkasan tentang penelitian terdahulu berikut ini :

1. Penelitian dilakukan oleh Octoviningsih 2006. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten, Investasi, dan PDRB di Kabupaten Bogor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”. Dan hasil penelitian ini adalah Investasi (PMA dan PMDN), dan PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Kota Bogor.
2. Penelitian dilakukan oleh I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Inflasi, PDRB, Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali”. Dan hasil penelitian ini adalah inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali Variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Itu artinya, naiknya PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan begitu sebaliknya, turunnya PDRB akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.
3. Penelitian dilakukan oleh Dimas dan Nenek Woyanti 2009. Penelitian ini berjudul “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”. Fakultas Ekonomi

Univeritas Diponegoro Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PDRB memiliki hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan tingkat upah riil dan investasi riil berhubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari landasan teori yang digunakan dalam menganalisis substansi masalah yang diteliti. Pendekatan yang dibutuhkan untuk melihat hasil pengolahan data empiris dengan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam kajian pustaka, maka penulis memilih variabel bebas yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur yaitu PMA, PMDN, PDRB, dan Inflasi.

Kekurangan modal dalam proses ekonomi di negara berkembang adalah salah satu faktor yang menjadi penghambat negara tersebut untuk maju. Kekurangan modal ini disebabkan oleh rendahnya investasi. Selain kekurangan modal juga terjadi tekanan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tersebut dibarengi dengan belum seimbangny kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan sosial ekonomi yang serius yaitu pengangguran. Melihat kondisi tersebut, maka peningkatan modal atau investasi sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian, oleh karenanya pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian melalui penghimpunan dana atau investasi baik

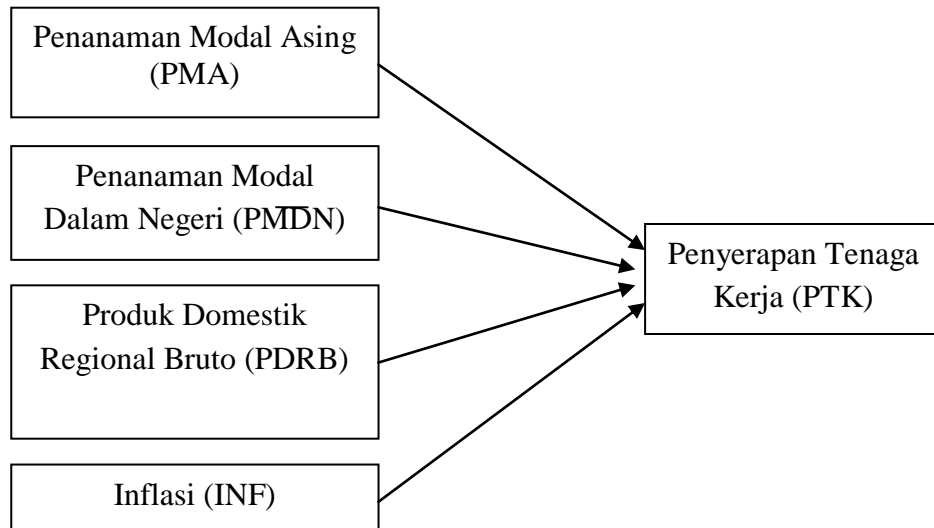
dari pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) (Sukirno, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh (Surya Darma, 2003) dengan judul “Pengaruh terhadap penyerapan tenaga investasi sektor industri kerja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, ketika pertumbuhan sektor industri naik, maka akan mengakibatkan laju rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja akan naik.

Variabel PDRB merupakan salah satu bukti cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor lainnya sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Suatu pandangan umum menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (*employment rate*). Berpijak dari teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat menyatakan bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan Y) merupakan fungsi dari modal (K) fisik, tenaga kerja (L) dan kemajuan teknologi yang dicapai (A). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi), dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja (Todaro, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Indra Dewa dan Ketut Suardhika Natha dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, PDRB dan upah

minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali” dengan hasil penelitian yaitu, variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Variabel PDRB memiliki pengaruh yang searah terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya apabila terjadi kenaikan nilai PDRB maka berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.

Variabel inflasi merupakan faktor yang cukup mempengaruhi adanya ketersediaan kesempatan kerja. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kesempatan kerja. Penelitian yang diteliti oleh Hasil penelitian lainnya yang diteliti oleh Novianti (2013) dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara”. Dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi berarti semakin berkurang penyerapan tenaga kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat inflasi maka semakin bertambah tenaga kerja yang mampu diserap.

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu proporsi yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji dahulu dengan menggunakan data hasil observasi (J. Supranto, 2001).

Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga ada pengaruh positif pada Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Industri Manufaktur di Kabupaten Bandung.
2. Diduga ada pengaruh positif pada Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Industri Manufaktur di Kabupaten Bandung.
3. Diduga ada pengaruh positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Industri Manufaktur di Kabupaten Bandung.
4. Diduga ada pengaruh negatif pada Inflasi (INF) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) Industri Manufaktur di Kabupaten Bandung.